

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan sebagian kecil dari suatu penelitian sensus yang meliputi seluruh jenis ternak gaduhan milik pemerintah di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, karena hanya mengambil bagian khusus ternak domba dan kerbau di Kabupaten Tasikmalaya dan Sumedang. Secara kebetulan penulis pernah melakukan penelitian untuk membuat skripsi di kedua kabupaten tersebut, sehingga sedikit banyak lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi peternak di daerah, yang akan mempermudah dan memperkaya pembahasan dalam laporan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan kerjasama antara Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat melalui Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran melali Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan.

Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bahu membahu melaksanakan kegiatan ini, yang dalam laporan ini tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dalam ruang tulisan yang terbatas ini kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas dan Sub Dinas Barbang Prfopinsi Jawa Barat
2. Pimpinan Fakultas Peternakan beserta seluruh staf yang terlibat.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Bandung, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Bab	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Ilustrasi	iii
Abstrak	iv
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Pendekatan Masalah	3
1.6. Lokasi dan Waktu	9
II. Obyek dan Metode Penelitian	10
2.1. Obyek Pengamatan	10
2.2. Metode Penelitian	10
2.3. Teknik Pengambilan Data	11
III. Hasil Sensus Inventarisasi Ternak Pemerintah	12
3.1. Populasi Ternak Pokok	12
3.2. Populasi Ternak Kerbau	12
3.3. Populasi Ternak Domba	13
IV. Alternatif Pola Gaduhan Ternak Pemerintah	15
4.1. Penilaian Peternak Terhadap Pola Gaduhan	15
4.2. Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil	17
4.3. Alternatif Perbaikan Sistem Gaduhan Ternak Pemerintah	19
V. Kesimpulan dan Saran	26
5.1. Kesimpulan	26
5.2. Saran-saran	27
Daftar Kepustakaan	28

DAFTAR TABEL DAN ILUSTRASI

Daftar Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Kewajiban Setoran Ternak Untuk Setiap Paket	4
2. Tabel 2. Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil	18
3. Tabel 3. Lamanya Pemeliharaan Ternak Pemerintah	23
4. Tabel 4. Alternatif Pola Bagi Hasil Berdasar Proporsi Biaya	24

Daftar Ilustrasi

1. Ilustrasi 1. Proses Peralihan Status Ternak	5
2. Ilustrasi 2. Terminologi Populasi Ternak Pemerintah	7

STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA

Maman Paturochman
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

ABSTRAK. Penelitian mengenai Studi Perbandingan Sistem Kredit Ternak Domba Dan Kerbau Dari Pemerintah telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Obyek yang diteliti terdiri dari 150 orang peternak domba dan 8 orang peternak kerbau yang menerima ternak gaduhan dari pemerintah propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Metode penelitian yang digunakan untuk menghimpun data empirik di lapangan adalah studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan merumuskan alternatif sistim kredit gaduhan yang diinginkan peternak dilihat dari jumlah ternak dan waktu pengembalian. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil analisis dan pembahasan adalah: 1. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, sedangkan ternak domba cukup baik.

2. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut: (a). Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun. (b). Berdasarkan perhitungan biaya yang diinvestasikan, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

Kata kunci: Studi Perbandingan, Sistem Kredit, Domba dan Kerbau, Tasikmalaya dan Sumedang

COMPARATIVE SUDY OF SHEEP AND BUFFALO CREDIT SYSTEM IN SUMEDANG AND TASIKMALAYA REGENCY

ABSTRACT. The comparative study of sheep and buffalo credit syatem has been conducted in Sumedang and Tasikmlaya Regency. The primary data has been collected from 150 sheep and 8 buffalo farmers. The method used in this study is case study. This study aimed to evaluate and formulate credit system that farmer wanted with timely and animal unit grounded. The conclution of thir study are: 1. The reproduction and buffalo population development with excisting system is in bed condition, but sheep is good enough. 2. The credit alternative that sheep and buffalo farmer wanted are: (a). In natural credit, the amount of animal has to distributed to farmers are 11 heads with 5 years gestation period for sheep and 3 heads of buffalos with 6 years gestation period. (b). In cost calculation that invested, the profit that occure has to distributed to 4 share, that are: 60 % for farmer; 30 % for government; 5 % for mortality cost and 5 % for operational cost.

Key words: Comparataive study, sheep and buffalo, credit system, Tasikmalaya and Sumedang.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan peternakan di Jawa Barat adalah melalui program penyebaran dan pengembangan ternak kepada para peternak, dengan sistim yang dianut adalah pola gaduhan yang diarahkan kepada pemilikan ternak, sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.146/Kpts/HK.050/2/93, tentang pedoman umum pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah . Melalui kebijakan ini, populasi dan produksi hasil ternak diharapkan dapat meningkat dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan peternak dan masyarakat pedesaan umumnya. Penyebaran dan pengembangan ternak oleh pemerintah Jawa Barat sudah dilaksanakan sejak Pelita Pertama, baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Kegiatan penyebaran ternak merupakan kegiatan yang saling terkait dan terus menerus. Hasil keturunan ternak gaduhan disebarkan kembali kepada peternak, sehingga jumlah peternak penggaduh secara konseptual akan terus bertambah.

Sebagai asset usaha, ternak memiliki karakteristik yang bersifat dinamis, karena eksistensinya merupakan respon terhadap lingkungan yang selalu berubah, mampu berkembang biak dan memiliki daya hidup yang beragam untuk setiap jenis ternak. Dengan demikian, secara alamiah ternak tersebut akan mengalami perubahan dalam struktur populasinya. Disamping factor biologis, perubahan populasi ternak di suatu daerah dipengaruhi oleh perpindahan ternak dari satu tempat ke tempat lainnya, akibat perilaku peternak dan kondisi sosial ekonomi yang mendesak peternak dalam mengambil keputusan usaha. Secara berkala keadaan ternak pemerintah ini selalu dilaporkan, namun

demikian sampai sejauh mana kebenaran atau akurasi data di lapangan, perlu dilakukan suatu pendataan serta kajian evaluasi berdasarkan kondisi saat ini di lapangan.

1.2. Identifikasi Masalah

Intisari dari paparan pada latar belakang dapat dirumuskan dan diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
2. Bagaimana penilaian peternak terhadap sistem kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
3. Apakah ada alternative system penyebaran dan pengembangan ternak yang diinginkan peternak.

1.3. Maksud dan tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian evaluasi kondisi ternak gaduhan adalah untuk mendapat gambaran keadaan ternak domba dan kerbau yang telah disembarkan.

1. Membandingkan perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
2. Merumuskan penilaian peternak terhadap system kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
3. Mengkaji system kredit ternak untuk memberikan alternative metode penyebaran dan pengembangan yang diinginkan peternak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan teoritis sehubungan dengan upaya pembentukan dan pengembangan model agribisnis peternakan domba kelompok yang dikelola secara khusus. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan diperoleh metode pengelolaan kelompok yang dapat meningkatkan pendapatan usaha peternakan domba di Kecamatan Kaduge khususnya dan umumnya di daerah pedesaan lain yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang kondusif.

1.5. Pendekatan Masalah

Beberapa pengertian di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah (SK Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993), yang dimaksud dengan sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak dari pemerintah kepada peternak dan dalam kurun waktu tertentu, maka peternak harus mengembalikan ternak pengganti hasil keturunan dari ternak yang pernah diberikan kepadanya dan tidak dinilai dengan uang. Semi gaduhan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah dimana ternak yang digaduhkan pemerintah kepada petani yang pengembaliannya berupa ternak yang dinilai dengan uang. Penggaduh adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan pengertian kredit menurut FAO (1981), tujuan sistem gaduhan ternak pada dasarnya identik dengan kredit produksi, keduanya dibangun atas kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam (penggaduh) dengan pemilik modal. Penggaduh memperoleh kewenangan untuk menggunakan asset pada saat sekarang dengan perjanjian kelak pada saat tertentu akan dikembalikan. Perbedaannya terletak pada cara dan bentuk pengembalian pinjaman. Pada sistem gaduhan setoran berbentuk natura (ternak setoran), sedangkan dalam sistem kredit produksi, pengembalian berupa innatura atau kalaupun dibayar secara natura, namun tetap didasarkan atas ukuran uang.

Penggaduhan ternak milik pemerintah diatur di dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/Kpts/2/93 Tahun 1993. Banyaknya ternak yang harus disetorkan dan dalam jangka waktu berapa lama ternak gaduhan harus disetorkan, bervariasi bergantung kepada jenis ternak. Ketentuan penggaduhan ternak milik pemerintah dapat diamati pada Tabel 1. berikut ini.

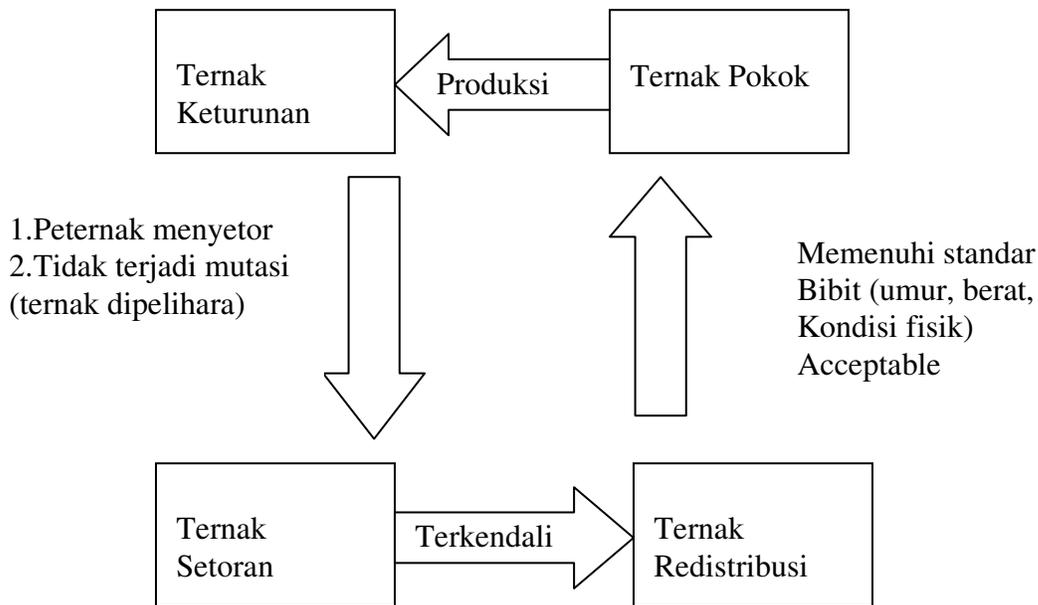
Tabel 1. Kewajiban Setoran Ternak Untuk Setiap Paket Ternak Gaduhan

Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jangka Waktu Pengembalian	Kewajiban Setor	Standar Umur Bibit
Kerbau	1 ekor betina	8 tahun	2 ekor	18 - 24 bulan
	Sepasang*	9 tahun	3 ekor	
Domba	1 ekor betina	2 tahun	2 ekor	8 - 12 bulan
	1 ekor jantan	2 tahun	1 ekor	

Keterangan: * = satu jantan dan satu betina

Mengacu kepada ketentuan jangka waktu pengembalian, maka tidak semua ternak keturunan adalah ternak setoran atau ternak redistribusi. Klaim atas ternak setoran berlaku, jika peternak memiliki kewajiban mengembalikan ternak setoran, maka ternak

keturunan yang dipelihara peternak dapat diklaim sebagai ternak setoran yang dapat didistribusikan. Ilustrasi 1. memperlihatkan bagaimana mekanisme proses peralihan status ternak dalam sistem penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.



Ilustrasi 1. Proses Peralihan Status Ternak dalam Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan.

Pada awalnya proses ini dimulai dari penyerahan ternak pokok dari pihak pemerintah kepada peternak melalui kewenangan yang diberikan kepada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya sebagai pelaksana yang bertindak langsung di lapangan. Peternak yang mendapat kerbau atau domba, sebelumnya sudah diseleksi terlebih dahulu dan diberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, risiko serta mekanisme sistem gaduhan. Dalam keadaan normal, ternak yang dipelihara akan menghasilkan anak

dan si anak ini disebut ternak keturunan. Jika kurun waktu yang telah ditentukan tiba, peternak harus menyerahkan ternak katurunannya kepada pengelola atau petugas khusus dan ternak ini disebut ternak setoran. Dalam mekanisme ini, ternak setoran yang telah diserahkan oleh peternak disebut ternak redistribusi. Selanjutnya ternak redistribusi tersebut oleh pengelola atau petugas khusus tadi diserahkan kembali kepada peternak lainnya dan ternak ini merupakan ternak pokok bagi peternak yang baru tersebut.

Secara teoritis melalui proses mekanisme seperti ini, lama kelamaan populasi ternak gaduhan ini akan bertambah banyak dan jika seluruh peternak di suatu daerah telah kebagian, maka ia berhak memperoleh kembali ternak gaduhan untuk kedua kalinya dan prosesnya akan terus menerus berlangsung seperti itu. Jika proses ini dapat berjalan secara mulus, maka dalam kurun waktu tertentu misalnya 20-30 tahun daerah ini akan menjadi pusat penyebaran ternak untuk daerah lainnya.

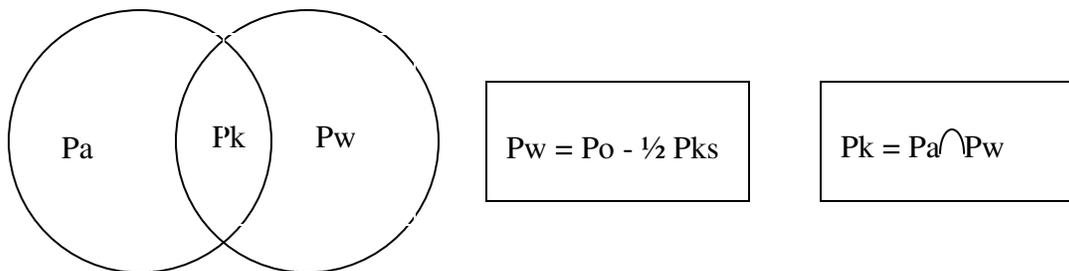
Perhitungan Populasi

Populasi Ternak Pokok

Yang dimaksud populasi di sini dibatasi oleh frame unit pengamatan, yaitu rumah tangga peternak pengaduh yang ternaknya berupa bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Ukuran populasi ternak pokok didasarkan kepada hasil pencatatan selama pengamatan (P_A), namun demikian sebagian dari ternak tersebut sudah beralih status, sehingga sebagian ternak atau bahkan seluruhnya sudah menjadi milik pengaduh, oleh karena itu tidak boleh diklaim sebagai ternak pemerintah. Untuk mengetahui populasi ternak pokok pemerintah, dapat dilakukan melalui pendekatan konsep himpunan sebagai berikut. Populasi yang telah dikoreksi (P_K) kemungkinan akan

lebih kecil dari pada P_A . Adapun perhitungan P_K didasarkan kepada ketentuan sebagai berikut ini, yaitu:

1. Populasi ternak pokok yang masih berstatus sebagai ternak gaduhan (P_K) merupakan bagian dari populasi ternak pokok yang masih ada dan dipelihara peternak penggaduh ($P_K < P_A$).
2. Populasi ternak pokok dapat dinyatakan sebagai ternak pemerintah apabila peternak masih memiliki kewajiban menyerahkan setoran dari ternak keturunannya ($P_K < P_W$).
3. Berdasarkan ketentuan butir 1 dan 2 di atas maka diperoleh populasi ternak pokok yang masih berstatus sebagai ternak gaduhan (P_K) merupakan *intersection* antara dua populasi, yaitu P_A dan P_W .



P_A = populasi ternak pokok hasil pengamatan.

P_K = populasi ternak yang telah dikoreksi.

P_W = populasi ternak pokok yang belum lunas.

$P_W = P_O - \frac{1}{2} P_{Ks}$.

P_O = populasi ternak pokok yang diterima peternak.

P_{Ks} = populasi ternak keturunan yang disetor peternak

$\frac{1}{2}$ = faktor perkalian untuk memperoleh jumlah ternak pokok yang telah dilunasi, ekuivalen dengan jumlah ternak keturunan yang telah disetor.

Ilustrasi 2. Terminologi Populasi Ternak Pemerintah dengan Pendekatan Konsep Himpunan

Populasi Ternak Siap Redistribusi

Ternak yang siap redistribusi merupakan ternak keturunan ternak pokok yang pada saat pencacahan masih dipelihara oleh peternak penggaduh dan peternak wajib mengembalikan setoran. Besarnya jumlah ternak yang siap redistribusi (P_r) merupakan *intersection* dari dua populasi.

$$P_r = P_a \cap P_s$$

P_a = Populasi ternak keturunan yang ada

P_s = Populasi ternak keturunan yang harus disetor

P_r = Populasi ternak keturunan yang siap redistribusi

Penentuan ternak keturunan yang siap diredistribusikan didasarkan pada catatan kewajiban peternak untuk menyerahkan ternak setoran. Berdasarkan hasil pencatatan dilakukan seleksi terhadap status utang peternak, karena klaim pemerintah atas ternak turunan/setoran untuk redistribusi dapat dibenarkan jika peternak yang bersangkutan memiliki kewajiban menyerahkan ternak setoran.

Populasi siap redistribusi dapat disebarakan jika memenuhi asumsi bahwa setelah dilakukan pencacahan: 1) tidak terjadi mutasi ternak keturunan yang telah dicatat tersebut dan 2) peternak bersedia memenuhi kewajibannya. Pada kenyataannya tidak ada jaminan atau paksaan bahwa peternak akan melaksanakan butir (1) dan (2), maka pengembalian ternak sepenuhnya bergantung kepada kesadaran peternak serta kesiapan petugas untuk menerima setoran.

Perkembangan Populasi Ternak Pemerintah

Perkembangan ternak pemerintah didasarkan kepada perhitungan populasi ternak yang dicatat selama survey. Ukuran populasi ini merupakan ukuran dalam kerangka atau *frame* peternak penggaduh hasil observasi. Ukuran pertama adalah kumulatif jumlah ternak pokok yang disebarakan selama periode 1990 sampai 1999 (P_0). Ukuran kedua adalah jumlah ternak pokok termasuk keturunannya yang masih dipelihara peternak (P_1).

Perhitungan di atas didasarkan kepada dua pertimbangan berikut, yaitu: Pertama, salah satu tujuan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah bertujuan meningkatkan populasi. Kedua, jika populasi hanya didasarkan kepada populasi ternak pokok tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun kriteria bahwa populasi ternak pemerintah berkembang, stagnan atau menurun didasarkan kepada nilai P_1 yang lebih besar, sama atau lebih kecil dari pada P_0 .

1.6. Lokasi dan Waktu

Sensus ternak gaduhan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang menerima bantuan ternak yang bersumber dari APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk menghimpun data lapangan selama dua bulan.

II

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

2.1. Objek Pengamatan

Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah 150 orang peternak yang menerima ternak domba dan 8 orang peternak yang menerima ternak kerbau gaduhan dan keturunannya serta peternak pemeliharanya. Peternak yang dimaksud adalah mereka yang memperoleh ternak gaduhan dari pemerintah melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Adapun jenis ternak yang digaduhkan terdiri dari ternak besar yang berupa kerbau dan ternak kecil berupa domba.

2.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengungkap data yang diperlukan adalah sensus yang dilakukan untuk masing-masing penggaduh ternak domba dan kerbau di masing-masing daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sumedang. Penggunaan metode sensus sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu inventarisasi dan perkembangan ternak domba dan kerbau gaduhan. Dengan demikian, maka seluruh peternak domba dan kerbau penggaduh diteliti dari mulai peternak penggaduh periode pertama sampai dengan periode terakhir. Secara garis besar penetapan responden meliputi tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, mengkaji daftar peternak dari Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat yang diperoleh dari laporan Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Tahap kedua, mengkonfirmasi data dari Propinsi dengan Seksi penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya serta mencari data

pelengkap yang berupa alamat domisili setiap peternak penggaduh. Tahap ketiga, observasi lapangan untuk masing-masing kabupaten, yang didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Kecamatan, ketua kelompok peternak dan aparat dari pedesaan.

2.3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data primer yang diperlukan, dilakukan melalui sensus langsung kepada peternak penerima ternak gaduhan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas Kecamatan serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.

III

HASIL SENSUS INVENTARISASI TERNAK PEMERINTAH

3.1. Populasi Ternak Pokok

Populasi ternak kerbau dan domba gaduhan milik pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu harus meningkat, jika program gaduhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini bertitik tolak dari suatu kegiatan yang diberi ungkapan sebagai suatu proses yang terus menerus tanpa berhenti (never ending process). Secara empirik keberhasilan sistim pengembangan populasi ternak seperti ini diperlihatkan dalam pengembangan populasi ternak sapi potong di Pulau Sumba yang diberi nama “Sumba Kontrak”.

3.1.1. Populasi Ternak Kerbau.

Berdasarkan hasil sensus, populasi ternak kerbau pokok di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang bersumber dari dana APBD ada 8 ekor. Penyebaran ternak kerbau ini sudah relatife lama dibanding dengan ternak lainnya, tetapi pada saat ini ada yang masih berstatus milik pemerintah tinggal 3 ekor dan 5 ekor lagi sudah menjadi milik peternak. Populasi ternak kerbau keturunan tercatat ada 5 ekor yang dipelihara oleh 4 orang peternak. Secara keseluruhan, ternak kerbau pokok dan keturunannya yang ada sekarang ini berjumlah 13 ekor.

Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, tidak menunjukkan perkembangan populasi yang

sesuai dengan harapan. Peternak tidak berhasil mengembangkan ternak kerbau bantuan pemerintah, sehingga tidak berpengaruh pada penambahan populasi.

Dibandingkan dengan jumlah ternak kerbau yang disebar, populasi ternak kerbau yang ada sekarang ini sangat jauh menurun, karena jumlah ternak yang disebar sebanyak 55 ekor, tetapi yang ada sekarang hanya 13 ekor. Dengan demikian, maka perkembangan populasi ternak kerbau ini negative dan penurunannya sangat besar, yaitu 42 ekor atau sebesar 76 %.

3.1.2. Populasi Ternak Domba

Populasi ternak domba pokok hasil sensus di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya berjumlah 420 ekor, yang terdiri dari 299 ekor ternak domba pokok awal dan 121 ekor ternak domba pokok keturunan. Populasi ternak domba keturunan dari sumber dana APBN dan APBD ada 279 ekor, yang terdiri dari 156 ekor anak domba dan 123 ekor domba siap sebar.

Ternak domba milik pemerintah yang disebar melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD menunjukkan hal yang sama dengan ternak kerbau, yaitu terjadi penurunan populasi. Dilihat dari sisi peternak, berarti mereka juga sama dengan peternak kerbau, yaitu tidak mampu mengembangkan ternak bantuan dari pemerintah.

Perbandingan antara ternak domba yang disebar melalui program bantuan pemerintah dengan populasi yang ada, terjadi penurunan sebesar 577 ekor atau 53 %. Angka ini diperoleh dari banyaknya ternak domba pokok yang disebar 897 ekor dan ternak domba pokok yang sekarang masih ada dipelihara peternak 420 ekor. Dengan

demikian, maka jumlah populasi ternak domba pokok milik pemerintah yang disebarkan kepada peternak mengalami penurunan populasi.

ALTERNATIF POLA GADUHAN TERNAK PEMERINTAH

4.1. Penilaian Peternak Terhadap Pola Gaduhan

Penyebaran ternak pemerintah kepada peternak melalui pola gaduhan telah lama dilaksanakan di beberapa wilayah, khususnya untuk ternak sapi potong, kerbau, domba dan kambing. Dalam pola gaduhan ini peternak penggaduh memperoleh ternak dari pemerintah untuk selanjutnya ternak keturunannya disebarkan kembali (revolving) ke peternak lain. Pola pengembalian untuk satu ekor induk betina, peternak penggaduh harus mengembalikan sebanyak dua ekor ternak keturunannya dalam waktu dua tahun atau kalau ditulis dalam sebuah rumus menjadi 1:2:2 untuk ternak domba dan untuk kerbau 1:8:2. Secara teoritis rumus tersebut sangat mudah untuk difahami, tetapi dalam prakteknya banyak hambatan yang dialami peternak, beberapa diantaranya yaitu: kematian ternak pokok, realisasi pengembalian, intensitas dan kualitas pembinaan serta monitoring.

Untuk memperoleh masukan tentang pelaksanaan sistim gaduhan ternak ini dievaluasi pula penilaian peternak, karena merekalah yang dapat menilai lancar-tidaknya dan baik-buruknya aplikasi sistim ini di masyarakat. Hasil pengamatan yang diperoleh dari para penggaduh ternak kerbau dan domba adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Bibit

Prioritas utama perbaikan system gaduhan adalah perbaikan kualitas ternak pokok yang sesuai dengan standar bibit yang layak. Sebagian besar peternak mengeluh bahwa

ternak yang mereka terima belum dewasa kelamin sehingga perlu waktu yang lama untuk beranak. Masalah lain yang timbul adalah tingginya tingkat kematian ternak dan ternak betina yang majir.

2. Pengembalian Ternak

Pengembalian ternak domba dan kerbau sebanyak dua ekor dari satu ekor bibit yang mereka terima dinilai terlalu berat. Mereka menginginkan pengembalian itu hanya satu ekor untuk setiap ekor bantuan ternak yang mereka terima. Penilaian ini muncul, karena ada bantuan ternak dari instansi lain seperti dinas sosial yang bersifat hibah atau persyaratan yang lebih ringan.

3. Penggantian Jenis Ternak Gaduhan

Peternak yang menerima ternak gaduhan kerbau menilai bahwa mereka tidak dapat merasakan keberhasilan yang cepat seperti halnya peternak domba, karena kemampuan reproduksi kerbau lambat. Untuk periode penggaduhan yang akan datang, mereka mengusulkan untuk mengganti kerbau dengan domba. Dilihat dari sisi lain sebenarnya peternak kerbau itu memperoleh pendapatan yang tidak diterima peternak domba, jika ia menyewakan kerbaunya untuk membajak sawah.

4. Intensitas Dan Kualitas Pembinaan

Peternak umumnya memerlukan pembinaan yang intensif, sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi. Selain itu, melalui pembinaan tersebut memberi kesan adanya kesungguhan petugas untuk mengembangkan ternak pemerintah

dan secara psikis memotivasi peternak untuk memelihara ternak lebih baik. Sikap petugas dalam melaksanakan peraturan sistim gaduhan menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan pemerintah.

5. Jumlah Paket Bantuan Ternak

Jumlah satuan paket ternak gaduhan domba disarankan untuk diperbesar, karena pendapatan yang diperoleh dari satu ekor induk sangat kecil, apalagi jika bibitnya kurang baik. Perlu dikaji lebih jauh, apakah dengan memperbesar paket gaduhan kinerjanya menjadi lebih baik. Jika pola gaduhan dipertahankan, perlu perbaikan pelaksanaannya dengan memperhatikan saran peternak.

4.2. Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil

Pola bagi hasil sebenarnya sudah lama berkembang dan telah menjadi tradisi yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal atau ternak dengan petani penggaduh, khususnya untuk ternak ruminansia besar dan kecil yang berupa sapi perah, sapi potong, kerbau, domba dan kambing. Istilah maro atau maparon atau nengah merupakan nama lain dari bagi hasil yang dikenal masyarakat pedesaan di seluruh daerah Jawa Barat, namun begitu pola bagi hasil untuk ternak bantuan pemerintah tidak begitu mendapat respon sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. berikut ini.

Pola bagi hasil yang selama ini berkembang di kalangan peternak adalah 50 % dari hasil atau anak keturunannya merupakan bagian peternak dan 50 % lagi bagian pemilik. Pola bagi hasil pada penggemukan sapi potong adalah 60 % dari tambahan kenaikan berat badan untuk peternak dan 40 % untuk pemilik.

Tabel 2. Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Ternak Pemerintah

Peternak	Respon (%)	
	Tahu Pola Bagi Hasil	Setuju Pola Bagi Hasil
1. Kerbau	95,00	0,00
2. Domba	86,38	12,43

Sebagian besar peternak domba dan kerbau (95 %) mengetahui dengan baik tentang pola bagi hasil, namun demikian sedikit sekali yang setuju menerapkan pola ini, bahkan tidak ada seorangpun peternak kerbau yang menyetujui pola bagi hasil tersebut. Ada anggapan dari pihak peternak bahwa pola bagi hasil hanya akan menguntungkan pemilik ternak saja. Rendahnya respon peternak terhadap pola bagi hasil ini, karena jika dibandingkan dengan berbagai pola gaduhan yang lain, pembagian 50:50 yang mereka alami lebih merugikan mereka.

Ada keragu ragaan di kalangan peternak mengenai pola bagi hasil ini, khususnya pada sistem pemeliharaan pembibitan. Dibandingkan dengan pola gaduhan, kewajiban peternak kepada pemilik tidak terbatas, peternak diharuskan menyetorkan sebagian dari hasil ternaknya/keturunannya selama ternak tersebut dipelihara. Pada pola gaduhan dengan sistem sumba kontrak, kewajiban peternak dalam hal lamanya dan jumlah pengembaliannya sudah ditentukan, sehingga setelah kewajiban penggaduh dilunasi, maka seluruh ternak yang ada menjadi milik peternak. Sistem sumba kontrak telah dirintis dan dikembangkan oleh pemerintah Belanda dalam upaya meningkatkan populasi ternak sapi Ongole dan keturunannya di Pulau Sumba. Upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan pada akhirnya sistem sumba kontrak ini ditiru dan dikembangkan oleh pemerintah

Indonesia untuk berbagai jenis ternak ruminansia lainnya seperti kerbau, domba dan kambing.

4.3. Alternatif Perbaikan Sistem Gaduhan Ternak Pemerintah.

Kajian ini didasarkan kepada persoalan-persoalan yang langsung terkait dengan aspek usaha ternak dan mengacu kepada kondisi faktual di lapangan yang ditemukan selama pelaksanaan survey. Pola pengembalian ternak setoran dalam sistem gaduhan ternak pemerintah menjadi sorotan utama, karena pada bagian inilah relatif banyak terjadi masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang lainnya.

Pengembalian ternak yang diterapkan dalam sistem gaduhan ternak pemerintah adalah pola Sumba Kontrak. Pada pola ini peternak yang menerima bantuan ternak wajib menyetorkan ternak keturunan dalam kurun waktu dan jumlah tertentu, sedangkan ternak pokok akan menjadi milik peternak, jika peternak dapat memenuhi segala kewajibannya. Pengembalian ternak yang diterima pemerintah diharapkan dapat disebarkan kembali/redistribusi kepada peternak lain yang belum menerima bantuan. Jika dapat berjalan dengan lancar, pola pengembangan ternak seperti ini sangat ideal, karena merupakan proses pengembangan yang terus menerus (*never ending process*).

Alternatif perbaikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pengembangan peternakan dapat ditempuh melalui enam prioritas tindakan sebagai berikut, yaitu:

- 1). Kualitas atau produktivitas ternak gaduhan.
- 2). Intensitas dan kualitas pembinaan serta metode pengawasan.
- 3). Besarnya paket bantuan per orang peternak.
- 4). Jangka waktu pengembalian yang optimal.

5). Beban setoran yang adil

6). Meningkatkan partisipasi secara terpadu antara peternak, petugas dan kelompok.

1. Kualitas Bibit Ternak Gaduhan

Bantuan ternak diberikan dalam bentuk uang, sehingga peternak dapat bebas memilih bibit sendiri yang sesuai dengan pertimbangan dan penilaian mereka. Dengan demikian tidak akan ada lagi keluhan mengenai kualitas bibit, karena sudah diserahkan kepada mereka dan pihak pemerintah tidak bertanggungjawab sepenuhnya. Apabila secara teknis hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka paling tidak peternak diberi kesempatan untuk melakukan seleksi terhadap ternak pokok yang akan mereka terima.

2. Paket Bibit Ternak

Salah satu tujuan dari pengembangan peternakan adalah untuk meningkatkan pendapatan peternak ke tingkat yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka besarnya paket pemberian bantuan ternak harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing peternak. Paket yang diberikan disesuaikan dengan pendapatan minimal yang harus dicapai dengan cara mengacu kepada standar Upah Minimum Regional (UMR).

Bibit ternak yang digaduhkan kepada peternak harus dipilih dengan baik atau jika memungkinkan diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga peternak dapat memilih ternak yang baik sesuai dengan keinginan mereka dan pelaksanaannya diawasi oleh petugas pemerintah. Sistem monitoring yang kontinyu diperlukan untuk pengamanan asset ternak dan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, agar pencatatan yang dilakukan

dapat berfungsi dengan baik harus didukung oleh pengawasan yang efektif oleh ketua kelompok.

3. Pembinaan Sistem Gaduhan

Jangka waktu pengembalian ternak gaduhan harus dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kondisi usaha ternak dengan memperhatikan biaya dan penerimaan usaha, sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Untuk pola bagi hasil perlu pembatasan waktu yang tegas untuk mempermudah perhitungan pendapatan dan pertanggungjawaban proyek. Pola bagi hasil harus didasarkan pada perbandingan beban biaya dan modal yang diinvestasikan masing-masing. Hasil produksi dapat dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk uang atau ternak.

Peternak sebaiknya terkonsentrasi dalam suatu kawasan dan terhimpun dalam suatu kelompok. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap tugas pencatatan dan pengumpulan dana pengembalian dari anggota. Anggota kelompok harus mematuhi seluruh aturan yang mereka buat sendiri. Anggota kelompok harus mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Anggota kelompok juga harus punya rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota dan saling tolong menolong dalam segala kegiatan yang menyangkut kelompo. Biaya operasional dan insentif bagi kelompok disisihkan dari bagian hasil yang diterima peternak dan pemerintah.

4. Lamanya Periode Gaduhan

Jangka waktu pengembalian untuk ternak gaduhan perlu dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi usaha ternak dengan memperhatikan pembiayaan dan

penerimaan usaha, sehingga secara finansial peternak tidak merasa dirugikan. Untuk pola bagi hasil perlu pembatasan waktu, sehingga kewajiban peternak tidak menjadi tidak terbatas. Pembatasan waktu ditujukan untuk mempermudah perhitungan pendapatan dan pertanggungjawaban proyek.

5. Kelayakan Pembagian Hasil

Pola bagi hasil antara peternak dengan pemerintah harus didasarkan pada perbandingan beban pembiayaan dan investasi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak dalam usaha tersebut. Hasil produksi yang harus dikembalikan kepada pemerintah dapat dimungkinkan adanya pilihan yang berupa uang atau ternak, tergantung kepada kesediaan dan kemampuan peternak.

6. Kelembagaan dalam Pembinaan Sistem Gaduhan

Untuk meningkatkan intensitas pembinaan dan mengefektifkan pengawasan terhadap perkembangan usaha, perlu ditunjang oleh suatu kelembagaan usaha yang melibatkan kelompok peternak. Peternak sebaiknya terkonsentrasi dalam suatu kawasan dan terhimpun dalam kelompok. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap tugas pencatatan dan pengumpulan dana pengembalian dari anggotanya. Untuk menjaga agar ada tertib organisasi, ketua kelompok harus bekerja sama dengan petugas Dinas Peternakan untuk membina anggotanya secara teratur dan berkesinambungan. Biaya operasional dan insentif bagi kelompok, disisihkan dari bagian hasil yang diterima peternak dan pemerintah.

4.3. Alternatif Penerapan Pola Bagi Hasil

Penyebaran ternak pemerintah dengan menggunakan pola bagi hasil harus memperhatikan batas waktu lamanya pemeliharaan yang didasarkan pada umur produktif ternak bibit atau produktivitasnya belum menurun. Adapun berbagai kriteria yang harus dijadikan standar dalam pola bagi hasil ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Lamanya Pemeliharaan Ternak Pemerintah Pada Sistem Bagi Hasil

Jenis Ternak	Sistim Pemeliharaan Pembibitan
Kerbau	6 tahun
Domba	3 tahun

Setelah waktu kontrak selesai, maka nilai ternak pokok menjadi milik bersama antara peternak dan pemerintah dengan bagian masing-masing sebesar 50 % dan banyaknya ternak yang harus diserahkan peternak kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian. Ternak bagian pemerintah pada kesempatan berikutnya digulirkan lagi kepada peternak lain yang belum mendapat kesempatan.

Alternatif lain adalah system bagi hasil ini tidak berdasarkan secara natura, tetapi berdasarkan pertimbangan proporsi biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak. Adapun pola bagi hasil tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini.

Penentuan skala usaha dihitung berdasarkan estimasi pendapatan peternak untuk memenuhi tingkat upah minimum regional (UMR). Bagi peternak yang telah memiliki ternak sendiri, adanya bantuan ternak gaduhan bersifat tambahan sehingga kepemilikan ternaknya meningkat mencapai jumlah skala minimum.

Tabel 4. Alternatif Pola Bagi Hasil Berdasarkan Proporsi Biaya

No.	Jenis Ternak	Lama Gaduhan (tahun)	Pembagian Hasil (%)	Skala Usaha (ekor)
1.	Kerbau	6	60:30:5:5	3
2.	Domba	5	60:30:5:5	11

Keterangan: Proporsi bagi hasil peternak 60 %; pemerintah 30 %; kematian 5 % dan operasional kelompok 5 %.

Pola bagi hasil seperti pada tabel di atas, pembagiannya harus berdasarkan nilai uang dari ternak yang akan dibagikan. Agar penilaiannya dapat dirasakan secara adil, maka peternak penggaduh dan petugas pemerintah harus bersepakat menentukan harga yang layak sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Dana kematian yang besarnya 5 % dikelola oleh petugas Dinas Peternakan untuk asuransi kematian ternak yang digaduhkan dan dana 5 % lainnya dikelola oleh ketua kelompok untuk kegiatan operasional.

Ternak keturunan yang akan dibagikan sebaiknya dinilai atau dijual setelah mencapai umur layak sebar atau setidaknya sama dengan kondisi ternak pokok pada saat diterima peternak. Ketentuan ini ditinjau dari kepentingan pihak pemilik perlu dinyatakan secara tegas, karena sangat berhubungan dengan nilai nominal yang diterima oleh pemilik dalam hal ini pemerintah. Agar dapat dirasakan secara adil, ketentuan umur jual ternak keturunan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Hal-hal lain yang masih perlu diatur dalam penerapan pola ini sekaligus sebagai bahan untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan dalam penerapan pola bagi hasil, diantaranya meliputi:

1. Penetapan petugas atau aparat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan penilaian hasil usaha.
2. Menjaga agar bibit ternak yang disebarakan kepada peternak bermutu baik. Perlu dikaji kemungkinan BPT-HMT diberi peran dalam hal pengadaan bibit yang akan disebarakan kepada peternak penggaduh.
3. Ketentuan ganti bagi peternak penggaduh yang menerima ternak pokok majir atau potong paksa.
4. Pembagian asset ternak pokok bagi peternak yang sampai batas waktu gaduhan tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan setoran.
5. Kriteria calon peternak yang memenuhi kualifikasi mau dan mampu menjadi peternak penggaduh.
6. Model pencatatan ternak (*recording*) yang mendukung terhadap fungsi pengawasan dan dapat dijadikan dasar penetapan penghasilan usaha.
7. Sanksi bagi peternak penggaduh dan petugas yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
8. Perlu ada ukuran produktivitas ternak (*lamb crop*) minimum yang harus dicapai selama periode gaduhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis, interpretasi dan pembahasan dari data yang terkumpul memberi arah pada perumusan kesimpulan sebagai berikut.

1. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, tetapi ternak domba cukup baik.
2. Penilaian peternak terhadap pelaksanaan kredit gaduhan ternak domba dan kerbau adalah sebagai berikut:
 - a. Bibit yang diberikan kualitasnya jelek dan tingkat kematian tinggi.
 - b. Kredit tidak diberikan dalam bentuk ternak, tetapi berupa uang sehingga peternak dapat memilih dan membeli ternak sendiri yang diawasi oleh petugas pemerintah.
 - c. Pengembalian bibit sebanyak 2 ekor dari 1 ekor yang diterima sangat memberatkan.
 - d. Peternak penggaduh kerbau ingin menggantinya dengan domba, karena hasilnya tidak dapat dirasakan secepat penggaduh domba.
3. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut:
 - a. Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan

kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun.

- b. Berdasarkan biaya, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

5.2. Saran-saran

Sejalan dengan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pola bagi hasil yang dapat diterapkan adalah 60-70 % untuk peternak, 20-30 % untuk pemerintah atau pemilik ternak, 5 % untuk operasional kelompok dan 5 % untuk pembinaan.
2. Untuk efisiensi pengawasan dan pembinaan, penyebaran ternak gaduhan berpedoman kepada azas konsentrasi dengan mengembangkan pola kawasan usaha peternakan berwawasan agribisnis.
3. Perlu adanya sosialisasi penerapan pola bagi hasil dalam sistim penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah melalui suatu bentuk uji coba.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian. 1993. Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/Kpts/2/93. Jakarta.
- _____ 1993. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.146/Kpts/HK. 050/2/93. Jakarta.
- FAO. 1965. Farm Management Manual. FAO Regional Office for Asia and The Far East. Bangkok.
- Gatenby, R. M. 1986. Sheep Production in The Tropics and Sub Tropics. First Published in The United State of America by Longman Inc. New York.
- Haryanto, B.R. Rangkuti, Y.T. Raharja dan H. Budiman.1999. Budidaya, Pasca Oanen dan Analisis Usaha Ternak Domba. Kerja Sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknomlogi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Hasan Hadiana. 1996. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pola Gaduhan Ternak Pemerintah. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat. Bandung.
- Kay, R.D. 1981. Farm Management: Planning, Control and Implementation. McGraw Hill International Book Company.
- Kedi Suradisastra. 1983. Attitudinal Correlates and Variation among Traditional Sheep Farmers. The Case of Village Sangiang. Talaga Majalengka. Prosiding Pertemuan Ilmiah Penelitian Ruminansia Kecil. Sr.CRSP. Balai Penelitian Ternak Bogor.
- Lasley, J.B. 1978. Genetics of Livestock Imptrovement. 3 rd Edition. Department of Animal Husbandry University of Missouri. Prentice Hall. Inc. Englewood.
- Mason, I.L. 1980. Prolific Tropical Sheep. FAO Animal Production and Health Paper. FAO of The United Nation. Rome.
- Mawi, S. Prifil Sistem Penggaduhan Ternak Domba dan Kambing di Jawa Barat. Proceeding Pertemuan Ilmia Ruminansia. Jilid 2: Ruminansia Kecil. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Departemen Pertanian. Bogor.
- Penny, D.H. 1969. Indonesia Dalam Agricultural Development in Asia. Editor: R.T. Shand. Australian National University Press. Canberra.

Robinson, D.W. 1977. Livestock in Indonesia. Research Report. No. 1. Centre for Animal Research and Development. Bogor.

Simatupang, P.; Jamal, E. Togatorop, M.H. 1993. Analisis Ekonomi Perbandingan Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Potong Pola PIR dengan Pola Gaduhan Tradisional di Propinsi Bali. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol.XII. No. 3 . Jakarta.

STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA

Maman Paturochman
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

ABSTRAK. Penelitian mengenai Studi Perbandingan Sistem Kredit Ternak Domba Dan Kerbau Dari Pemerintah telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Obyek yang diteliti terdiri dari 150 orang peternak domba dan 8 orang peternak kerbau yang menerima ternak gaduhan dari pemerintah propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Metode penelitian yang digunakan untuk menghimpun data empirik di lapangan adalah studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan merumuskan alternatif sistim kredit gaduhan yang diinginkan peternak dilihat dari jumlah ternak dan waktu pengembalian. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil analisis dan pembahasan adalah: 1. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, sedangkan ternak domba cukup baik.

2. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut: (a). Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun. (b). Berdasarkan perhitungan biaya yang diinvestasikan, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

Kata kunci: Studi Perbandingan, Sistem Kredit, Domba dan Kerbau, Tasikmalaya dan Sumedang

COMPARATIVE STUDY OF SHEEP AND BUFFALO CREDIT SYSTEM IN SUMEDANG AND TASIKMALAYA REGENCY

ABSTRACT. The comparative study of sheep and buffalo credit system has been conducted in Sumedang and Tasikmalaya Regency. The primary data has been collected from 150 sheep and 8 buffalo farmers. The method used in this study is case study. This study aimed to evaluate and formulate credit system that farmer wanted with timely and animal unit grounded. The conclusion of this study are: 1. The reproduction and buffalo population development with existing system is in bed condition, but sheep is good enough. 2. The credit alternative that sheep and buffalo farmer wanted are: (a). In natural credit, the amount of animal has to distributed to farmers are 11 heads with 5 years gestation period for sheep and 3 heads of buffalos with 6 years gestation period. (b). In cost calculation that invested, the profit that occur has to distributed to 4 share, that are: 60 % for farmer; 30 % for government; 5 % for mortality cost and 5 % for operational cost.

Key words: Comparative study, sheep and buffalo, credit system, Tasikmalaya and Sumedang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan peternakan di Jawa Barat adalah melalui program penyebaran dan pengembangan ternak kepada para peternak dengan sistim pola gaduhan. Melalui kebijakan ini, populasi dan produksi hasil ternak diharapkan dapat meningkat dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan peternak dan masyarakat pedesaan umumnya. Penyebaran dan pengembangan ternak oleh pemerintah Jawa Barat sudah dilaksanakan sejak Pelita Pertama, baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Kegiatan penyebaran ternak merupakan kegiatan yang saling terkait dan terus menerus. Hasil keturunan ternak gaduhan disebarkan kembali kepada peternak, sehingga jumlah peternak penggaduh secara konseptual akan terus bertambah.

Sebagai asset usaha, ternak memiliki karakteristik yang bersifat dinamis, karena eksistensinya merupakan respon terhadap lingkungan yang selalu berubah, mampu berkembang biak dan memiliki daya hidup yang beragam untuk setiap jenis ternak. Dengan demikian, secara alamiah ternak tersebut akan mengalami perubahan dalam struktur populasinya. Disamping factor biologis, perubahan populasi ternak di suatu daerah dipengaruhi oleh perpindahan ternak dari satu tempat ke tempat lainnya, akibat perilaku peternak dan kondisi social ekonomi yang mendesak peternak dalam mengambil keputusan usaha.

Identifikasi Masalah

Intisari dari paparan pada latar belakang dapat dirumuskan dan diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

4. Sejauhmana perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
5. Bagaimana penilaian peternak terhadap sistem kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
6. Apakah ada alternative system penyebaran dan pengembangan ternak yang diinginkan peternak.

Maksud dan tujuan

Tujuan dilaksanakannya kajian evaluasi kondisi ternak gaduhan adalah untuk mendapat gambaran keadaan ternak domba dan kerbau yang telah disebarkan.

4. Membandingkan perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
5. Merumuskan penilaian peternak terhadap system kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
6. Mengkaji system kredit ternak untuk memberikan alternative metode penyebaran dan pengembangan yang terbaik bagi peternak maupun pemerintah.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data primer yang diperlukan, dilakukan melalui sensus langsung kepada peternak penerima ternak gaduhan. Data sekunder diperoleh dari Dinas

Peternakan Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas Kecamatan serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.

Lokasi dan Waktu

Sensus ternak gaduhan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang menerima bantuan ternak yang bersumber dari APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk menghimpun data lapangan selama dua bulan.

Objek Pengamatan

Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah 150 orang peternak yang menerima ternak domba dan 8 orang peternak yang menerima ternak kerbau gaduhan. Peternak memperoleh ternak gaduhan dari pemerintah melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengungkap data yang diperlukan adalah studi kasus. Penggunaan metode studi kasus sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu inventarisasi dan perkembangan ternak domba dan kerbau kredit. Dengan demikian, maka seluruh peternak domba dan kerbau penggaduh diteliti. Secara garis besar penetapan responden meliputi tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, mengkaji daftar peternak dari Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat yang diperoleh dari laporan Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Tahap kedua, mengkonfirmasi data dari Propinsi dengan Seksi penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya serta mencari data pelengkap yang berupa alamat domisili setiap peternak penggaduh. Tahap ketiga, observasi lapangan untuk masing-masing kabupaten, yang didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Kecamatan, ketua kelompok peternak dan aparat dari pedesaan.

Terminologi

Beberapa pengertian di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah (SK Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993), yang dimaksud dengan system gaduhan adalah system penyebaran ternak dari pemerintah kepada peternak dan dalam kurun waktu tertentu, maka peternak harus mengembalikan ternak pengganti hasil keturunan dari ternak yang pernah diberikan kepadanya. Penggaduh adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan.

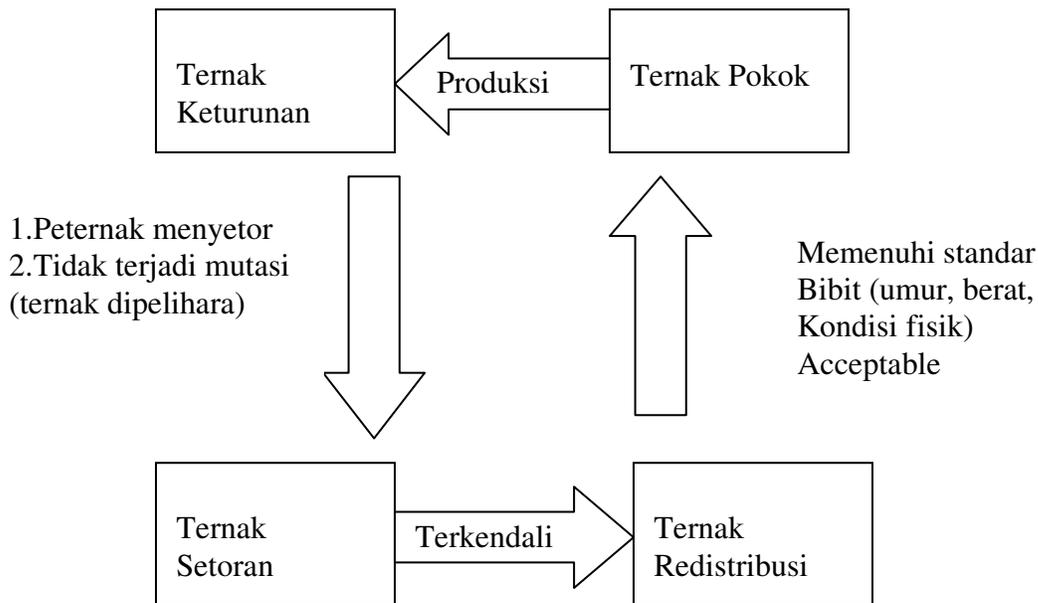
Berdasarkan pengertian kredit menurut FAO (1981), tujuan system gaduhan ternak pada dasarnya identik dengan kredit produksi, keduanya dibangun atas kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam (penggaduh) dengan pemilik modal. Penggaduh memperoleh kewenangan untuk menggunakan asset pada saat sekarang dengan perjanjian kelak pada saat tertentu akan dikembalikan. Ketentuan penggaduhan ternak milik pemerintah dapat diamati pada Tabel 1. berikut ini.

Banyaknya ternak yang harus disetorkan dan berapa lama jangka waktu pengembaliannya, tergantung kepada jenis ternak gaduhannya. Mengacu kepada ketentuan jangka waktu pengembalian, maka tidak semua ternak keturunan adalah ternak setoran. Klaim atas ternak setoran berlaku, jika peternak memiliki kewajiban mengembalikan ternak setoran.

Tabel 1. Kewajiban Setoran Ternak Untuk Setiap Paket Ternak Gaduhan

Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jangka Waktu Pengembalian	Kewajiban Setor	Standar Umur Bibit
Kerbau	1 ekor betina sepasang	8 tahun	2 ekor	18 - 24 bulan
		9 tahun	3 ekor	
Domba/Kambing	1 ekor betina 1 ekor jantan	2 tahun	2 ekor	8 - 12 bulan
		2 tahun	1 ekor	

Secara konseptual perkembangan ternak gaduhan merupakan proses yang berlangsung terus menerus (never ending), populasinya akan terus meningkat apabila didukung oleh asumsi-asumsi sebagaimana digambarkan pada Ilustrasi 1. berikut. Ternak keturunan akan beralih status menjadi ternak setoran, jika proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tidak terpenuhinya asumsi di atas secara bertahap akan menghambat proses redistribusi dan pada akhirnya populasi akan menurun.

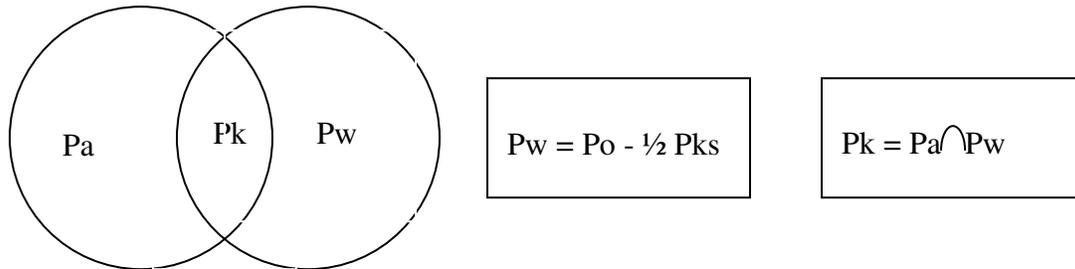


Ilustrasi 1. Proses Peralihan Status Ternak dalam Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan.

Perhitungan Populasi

Populasi Ternak Pokok

Yang dimaksud populasi di sini dibatasi oleh frame unit pengamatan, yaitu rumah tangga peternak pengaduh yang ternaknya berupa bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Untuk mengetahui populasi ternak pokok, dapat dilakukan melalui pendekatan konsep himpunan sebagai berikut.



- Pa = populasi ternak pokok hasil pengamatan.
- Pk = populasi ternak yang telah dikoreksi.
- Pw = populasi ternak pokok yang belum lunas.
- $Pw = Po - \frac{1}{2} Pks$.
- Po = populasi ternak pokok yang diterima peternak.
- Pks = populasi ternak keturunan yang disetor peternak

Ilustrasi 2. Terminologi Populasi Ternak Pemerintah dengan Pendekatan Konsep Himpunan

Populasi Ternak Siap Redistribusi

Ternak yang siap redistribusi merupakan ternak keturunan ternak pokok yang pada saat pencacahan masih dipelihara oleh peternak pengaduh dan peternak wajib mengembalikan setoran. Besarnya jumlah ternak yang siap redistribusi (Pr) merupakan intersection dari dua populasi.

$$Pr = Pa \cap Ps$$

- Pa = Populasi ternak keturunan yang ada
- Ps = Populasi ternak keturunan yang harus disetor
- Pr = Populasi ternak keturunan yang siap redistribusi

Penentuan ternak keturunan yang siap didistribusikan didasarkan pada catatan kewajiban peternak untuk menyerahkan ternak setoran. Populasi siap redistribusi dapat disebarkan jika memenuhi asumsi bahwa setelah dilakukan pencacahan: 1) tidak terjadi mutasi ternak keturunan yang telah dicatat tersebut.

Perkembangan Populasi Ternak Pemerintah

Perkembangan ternak pemerintah didasarkan kepada perhitungan populasi ternak yang dicatat selama survey. Ukuran pertama adalah kumulatif jumlah ternak pokok yang disebarakan selama periode 1990 sampai 1999 (P_0). Ukuran kedua adalah jumlah ternak pokok termasuk keturunannya yang masih dipelihara peternak (P_1).

Perhitungan di atas didasarkan kepada dua pertimbangan berikut, yaitu: Pertama, salah satu tujuan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah bertujuan meningkatkan populasi. Kedua, jika populasi hanya didasarkan kepada populasi ternak pokok tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun kriteria bahwa populasi ternak berkembang didasarkan kepada nilai P_1 yang lebih besar dari pada P_0 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Populasi Ternak

Populasi ternak kerbau dan domba gaduhan milik pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu harus meningkat, jika program gaduhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini bertitik tolak dari suatu kegiatan yang diberi ungkapan sebagai suatu proses yang terus menerus tanpa berhenti (never ending process). Secara empirik keberhasilan sistim pengembangan populasi ternak seperti ini diperlihatkan dalam pengembangan populasi ternak sapi potong di Pulau Sumba yang diberi nama "Sumba Kontrak".

1.1. Populasi Ternak Kerbau.

Berdasarkan hasil sensus, populasi ternak kerbau pokok di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang bersumber dari dana APBD ada 8 ekor. Penyebaran ternak kerbau ini sudah relative lama dibanding dengan ternak lainnya, tetapi pada saat ini ada yang masih berstatus milik pemerintah tinggal 3 ekor dan 5 ekor lagi sudah menjadi milik peternak. Populasi ternak kerbau keturunan tercatat ada 5 ekor yang dipelihara oleh 4 orang peternak. Secara keseluruhan, ternak kerbau pokok dan keturunannya yang ada sekarang ini berjumlah 13 ekor.

Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, tidak menunjukkan perkembangan populasi yang sesuai dengan harapan. Peternak tidak berhasil mengembangkan ternak kerbau bantuan pemerintah, sehingga tidak berpengaruh pada penambahan populasi.

Dibandingkan dengan jumlah ternak kerbau yang disebarakan, populasi ternak kerbau yang ada sekarang ini sangat jauh menurun, karena jumlah ternak yang disebarakan sebanyak 55 ekor, tetapi yang ada sekarang hanya 13 ekor. Dengan demikian, maka perkembangan populasi ternak kerbau ini negative dan penurunannya sangat besar, yaitu 42 ekor atau sebesar 76 %.

1.2. Populasi Ternak Domba

Populasi ternak domba pokok hasil sensus di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya berjumlah 420 ekor, yang terdiri dari 299 ekor ternak domba pokok awal dan 121 ekor ternak domba pokok keturunan. Populasi ternak domba keturunan dari

sumber dana APBN dan APBD ada 279 ekor, yang terdiri dari 156 ekor anak domba dan 123 ekor domba siap sebar.

Ternak domba milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD menunjukkan hal yang sama dengan ternak kerbau, yaitu terjadi penurunan populasi. Dilihat dari sisi peternak, berarti mereka juga sama dengan peternak kerbau, yaitu tidak mampu mengembangkan ternak bantuan dari pemerintah.

Perbandingan antara ternak domba yang disebarakan melalui program bantuan pemerintah dengan populasi yang ada, terjadi penurunan sebesar 577 ekor atau 53 %. Angka ini diperoleh dari banyaknya ternak domba pokok yang disebarakan 897 ekor dan ternak domba pokok yang sekarang masih ada dipelihara peternak 420 ekor. Dengan demikian, maka jumlah populasi ternak domba pokok milik pemerintah yang disebarakan kepada peternak mengalami penurunan populasi.

2. Penilaian Peternak Terhadap Pola Gaduhan

Untuk memperoleh masukan tentang pelaksanaan sistim gaduhan ternak ini dievaluasi pula penilaian peternak, karena merekalah yang dapat menilai lancar-tidaknya dan baik-buruknya aplikasi sistim ini di masyarakat. Hasil pengamatan yang diperoleh dari para penggaduh ternak kerbau dan domba adalah sebagai berikut.

2.1. Kualitas Bibit

Prioritas utama perbaikan system gaduhan adalah perbaikan kualitas ternak pokok yang sesuai dengan standar bibit yang layak. Sebagian besar peternak mengeluh bahwa ternak yang mereka terima belum dewasa kelamin sehingga perlu waktu yang lama untuk beranak. Masalah lain yang timbul adalah tingginya tingkat kematian ternak dan ternak betina yang majir.

2.2. Pengembalian Ternak

Pengembalian ternak domba dan kerbau sebanyak dua ekor dari satu ekor bibit yang mereka terima dinilai terlalu berat. Mereka menginginkan pengembalian itu hanya satu ekor untuk setiap ekor bantuan ternak yang mereka terima. Penilaian ini muncul, karena ada bantuan ternak dari instansi lain seperti dinas sosial yang bersifat hibah atau persyaratan yang lebih ringan.

2.3. Penggantian Jenis Ternak Gaduhan

Peternak yang menerima ternak gaduhan kerbau menilai bahwa mereka tidak dapat merasakan keberhasilan yang cepat seperti halnya peternak domba, karena kemampuan reproduksi kerbau lambat. Untuk periode penggaduhan yang akan datang, mereka mengusulkan untuk mengganti kerbau dengan domba. Dilihat dari sisi lain sebenarnya peternak kerbau itu memperoleh pendapatan yang tidak diterima peternak domba, jika ia menyewakan kerbaunya untuk membajak sawah.

2.4. Intensitas Dan Kualitas Pembinaan

Peternak umumnya memerlukan pembinaan yang intensif, sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi. Selain itu, melalui pembinaan tersebut memberi kesan adanya kesungguhan petugas untuk mengembangkan ternak pemerintah

dan secara psikis memotivasi peternak untuk memelihara ternak lebih baik. Sikap petugas dalam melaksanakan peraturan sistim gaduhan menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan pemerintah.

2.5. Jumlah Paket Bantuan Ternak

Jumlah satuan paket ternak gaduhan domba disarankan untuk diperbesar, karena pendapatan yang diperoleh dari satu ekor induk sangat kecil, apalagi jika bibitnya kurang baik. Perlu dikaji lebih jauh, apakah dengan memperbesar paket gaduhan kinerjanya menjadi lebih baik. Jika pola gaduhan dipertahankan, perlu perbaikan pelaksanaannya dengan memperhatikan saran peternak.

3. Alternatif Perbaikan Sistem Gaduhan Ternak Pemerintah.

Pengembalian ternak yang diterapkan dalam sistim gaduhan ternak pemerintah adalah pola Sumba Kontrak. Pada pola ini peternak yang menerima bantuan ternak wajib menyetorkan ternak keturunan dalam dalam kurun waktu dan jumlah tertentu, sedangkan ternak pokok akan menjadi milik peternak. Pengembalian ternak yang diterima pemerintah disebarkan kembali kepada peternak lain yang belum menerima bantuan. Jika dapat berjalan dengan lancar, pola pengembangan ternak seperti ini sangat ideal, karena merupakan proses pengembangan yang terus menerus.

Alternatif perbaikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pengembangan peternakan dapat ditempuh melalui tindakan sebagai berikut:

3.1. Paket Bibit Ternak Dan Pengawasan

Salah satu tujuan dari pengembangan peternakan adalah untuk meningkatkan pendapatan peternak ke tingkat yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka besarnya paket pemberian bantuan ternak harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing peternak.

Bibit ternak yang digaduhkan kepada peternak harus dipilih dengan baik atau jika memungkinkan diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga peternak dapat memilih ternak yang baik sesuai dengan keinginan mereka dan pelaksanaannya diawasi oleh petugas pemerintah.

Sistim monitoring yang kontinyu diperlukan untuk pengamanan asset ternak dan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, agar pencatatan yang dilakukan dapat berfungsi dengan baik harus didukung oleh pengawasan yang efektif oleh ketua kelompok.

3.2. Pembinaan Sistem Gaduhan

Jangka waktu pengembalian ternak gaduhan harus dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kondisi usaha ternak dengan memperhatikan biaya dan penerimaan usaha, sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Untuk pola bagi hasil perlu pembatasan waktu yang tegas untuk mempermudah perhitungan pendapatan dan pertanggungjawaban proyek. Pola bagi hasil harus didasarkan pada perbandingan beban biaya dan modal yang diinvestasikan masing-masing. Hasil produksi dapat dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk uang atau ternak.

Peternak sebaiknya terkonsentrasi dalam suatu kawasan dan terhimpun dalam suatu kelompok. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap tugas pencatatan dan

pengumpulan dana pengembalian dari anggota. Biaya operasional dan insentif bagi kelompok disisihkan dari bagian hasil yang diterima peternak dan pemerintah.

3.3. Alternatif Penerapan Pola Bagi Hasil

Penyebaran ternak pemerintah dengan menggunakan pola bagi hasil harus memperhatikan batas waktu lamanya pemeliharaan yang didasarkan pada umur produktif ternak bibit. Adapun berbagai kriteria yang harus dijadikan standar dalam pola bagi hasil ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Lamanya Pemeliharaan Ternak Pemerintah Pada Sistem Bagi Hasil

Jenis Ternak	Sistim Pemeliharaan Pembibitan
Kerbau	6 tahun
Domba	5 tahun

Setelah waktu kontrak selesai, maka nilai ternak pokok menjadi milik bersama antara peternak dan pemerintah dengan bagian masing-masing sebesar 50 % dan banyaknya ternak yang harus diserahkan peternak kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian. Ternak bagian pemerintah pada kesempatan berikutnya digulirkan lagi kepada peternak lain yang belum mendapat kesempatan.

Alternatif lain adalah system bagi hasil ini tidak berdasarkan secara natura, tetapi berdasarkan pertimbangan proporsi biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak. Adapun pola bagi hasil tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Alternatif Pola Bagi Hasil Berdasarkan Proporsi Biaya

No.	Jenis Ternak	Lama Gaduhan (tahun)	Pembagian Hasil (%)	Skala Usaha (ekor)
1.	Kerbau	6	60:30:5:5	3
2.	Domba	5	60:30:5:5	11

Keterangan: Proporsi bagi hasil peternak 60 %; pemerintah 30 %; kematian 5 % dan operasional kelompok 5 %.

Penentuan skala usaha dihitung berdasarkan estimasi pendapatan peternak untuk memenuhi tingkat upah minimum regional (UMR). Bagi peternak yang telah memiliki ternak sendiri, adanya bantuan ternak gaduhan bersifat tambahan sehingga kepemilikan ternaknya meningkat mencapai jumlah skala minimum.

Pola bagi hasil seperti pada tabel di atas, pembagiannya harus berdasarkan nilai uang dari ternak yang akan dibagikan. Agar penilaiannya dapat dirasakan secara adil, maka peternak penggaduh dan petugas pemerintah harus bersepakat menentukan harga yang layak sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Dana kematian yang besarnya 5 % dikelola oleh petugas Dinas Peternakan untuk asuransi kematian ternak yang digaduhkan dan dana 5 % lainnya dikelola oleh ketua kelompok untuk kegiatan operasional.

KESIMPULAN

Hasil analisis, interpretasi dan pembahasan dari data yang terkumpul memberi arah pada perumusan kesimpulan sebagai berikut.

4. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, tetapi ternak domba cukup baik.
5. Penilaian peternak terhadap pelaksanaan kredit gaduhan ternak domba dan kerbau adalah sebagai berikut:
 - a. Bibit yang diberikan kualitasnya jelek dan tingkat kematian tinggi.
 - b. Kredit tidak diberikan dalam bentuk ternak, tetapi berupa uang sehingga peternak dapat memilih dan membeli ternak sendiri yang diawasi oleh petugas pemerintah.
 - c. Pengembalian bibit sebanyak 2 ekor dari 1 ekor yang diterima sangat memberatkan.
 - d. Peternak penggaduh kerbau ingin menggantinya dengan domba, karena hasilnya tidak dapat dirasakan secepat penggaduh domba.
6. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut:
 - a. Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun.
 - b. Berdasarkan biaya, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian. 1993. Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/Kpts/2/93. Jakarta.

_____. 1993. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.146/Kpts/HK. 050/2/93. Jakarta.

FAO. 1965. Farm Management Manual. FAO Regional Office for Asia and The Far East. Bangkok.

- Gatenby, R. M. 1986. Sheep Production in The Tropics and Sub Tropics. First Published in The United State of America by Longman Inc. New York.
- Haryanto, B.R. Rangkuti, Y.T. Raharja dan H. Budiman. 1999. Budidaya, Pasca Oanen dan Analisis Usaha Ternak Domba. Kerja Sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknomlogi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Hasan Hadiana. 1996. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pola Gaduhan Ternak Pemerintah. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat. Bandung.
- Kay, R.D. 1981. Farm Management: Planning, Control and Implementation. McGraw Hill International Book Company.
- Kedi Suradisastra. 1983. Attitudinal Correlates and Variation among Traditional Sheep Farmers. The Case of Village Sangiang. Talaga Majalengka. Prosiding Pertemuan Ilmiah Penelitian Ruminansia Kecil. Sr.CRSP. Balai Penelitian Ternak Bogor.
- Lasley, J.B. 1978. Genetics of Livestock Improvement. 3 rd Edition. Department of Animal Husbandry University of Missouri. Prentice Hall. Inc. Englewood.
- Mason, I.L. 1980. Prolific Tropical Sheep. FAO Animal Production and Health Paper. FAO of The United Nation. Rome.
- Mawi, S. Prifil Sistem Penggaduhan Ternak Domba dan Kambing di Jawa Barat. Proceeding Pertemuan Ilmia Ruminansia. Jilid 2: Ruminansia Kecil. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Departemen Pertanian. Bogor.
- Penny, D.H. 1969. Indonesia Dalam Agricultural Development in Asia. Editor: R.T. Shand. Australian National University Press. Canberra.
- Robinson, D.W. 1977. Livestock in Indonesia. Research Report. No. 1. Centre for Animal Research and Development. Bogor.
- Simatupang, P.; Jamal, E. Togatorop, M.H. 1993. Analisis Ekonomi Perbandingan Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Potong Pola PIR dengan Pola Gaduhan Tradisional di Propinsi Bali. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol.XII. No. 3 . Jakarta.

